

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Institusi dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Variabel *voice and accountability* dan *government effectiveness* dalam jangka pendek memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, ketika *voice and accountability* dan *government effectiveness* meningkat maka kemiskinan menurun dan sebaliknya. Variabel *regulatory quality* dalam jangka pendek berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Sedangkan variabel *political stability and absence of violence/terrorism*, *rule of law*, *control of corruption*, dan *human development index* dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Variabel *voice and accountability*, *government effectiveness*, dan *human development index* dalam jangka panjang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel *regulatory quality* dalam jangka panjang berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Sedangkan variabel *political stability and absence of violence/terrorism*, *rule of law*, dan *control of corruption* dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

## B. Implikasi

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa implikasi yang meliputi:

1. Temuan empiris menunjukkan bahwa variabel *voice and accountability* dan *government effectiveness* memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, peningkatan kualitas institusi yang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan efektivitas pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan akan berdampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakan yang mendorong peningkatan suara masyarakat serta memperkuat efektivitas administrasi pemerintahan harus menjadi prioritas strategis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, variabel *regulatory quality* dalam jangka pendek menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan kualitas regulasi dalam kerangka waktu tersebut, tanpa diimbangi dengan efek yang memadai, dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, reformasi regulasi harus dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan, memastikan bahwa regulasi tidak memberatkan kelompok rentan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *political stability and absence of violence/terrorism, rule of law, control of corruption*, serta *human development index* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut mungkin memiliki

pengaruh jangka panjang yang lebih dominan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang belum sepenuhnya terwakili dalam analisis ini. Implikasi kebijakan yang utama adalah memperkuat institusi demokrasi dan efektivitas pemerintah sebagai instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan. Peningkatan *voice and accountability* harus diintegrasikan dengan reformasi regulasi yang berorientasi pada manfaat sosial, serta penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi. Upaya ini harus didukung oleh komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa reformasi regulasi tidak menimbulkan hambatan baru bagi kelompok masyarakat rentan. Sementara itu, faktor-faktor lain seperti stabilitas politik, supremasi hukum, dan pembangunan manusia, meskipun penting, perlu diintegrasikan dalam strategi jangka panjang yang komprehensif demi mencapai pengaruh positif yang berkelanjutan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.

2. Variabel *voice and accountability*, *government effectiveness*, dan *human development index* memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas institusi demokratis, efektivitas pemerintahan, serta pembangunan manusia secara konsisten berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat kapasitas administrasi pemerintahan, dan meningkatkan indikator pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan

nasional guna mencapai pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan. Sebaliknya, variabel *regulatory quality* menunjukkan pengaruh positif terhadap kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas regulasi yang tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan dan penyesuaian kebijakan yang efektif berpotensi memperparah kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, reformasi regulasi harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas regulasi itu sendiri, tetapi juga untuk memastikan regulasi tersebut mendukung pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel *political stability and absence of violence/terrorism, rule of law, and control of corruption* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang. Temuan ini menimbulkan indikasi bahwa faktor-faktor tersebut mungkin memiliki pengaruh yang lebih bersifat jangka panjang dan tidak langsung terhadap dinamika kemiskinan, atau pengaruhnya mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang belum sepenuhnya teridentifikasi dalam kerangka analisis ini. Implikasi kebijakan yang utama adalah perlunya penguatan institusi demokrasi dan efektivitas pemerintah sebagai strategi utama dalam upaya pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Peningkatan *voice and accountability* serta pembangunan manusia harus dipandang sebagai pilar utama dalam reformasi institusi. Di sisi lain, reformasi regulasi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan dampaknya terhadap kelompok rentan

agar tidak menimbulkan efek sebaliknya. Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap regulasi juga menjadi hal yang esensial untuk memastikan bahwa regulasi mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan kesejahteraan.

### C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan pengaruh peristiwa eksternal yang bersifat krisis atau kejadian besar selama periode 1999-2023 seperti fluktuasi ekonomi global, krisis keuangan 2008, serta pandemi Covid-19. Ketidakmampuan untuk memasukkan faktor-faktor tersebut dapat membatasi pemahaman lengkap mengenai dinamika hubungan antara kualitas institusi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap variabel-variabel yang dianalisis dan dapat mempengaruhi hasil serta interpretasi temuan penelitian.